

**PENJELASAN MENGENAI
ANGGARAN PEMBANGUNAN 1998/99**

**Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan Pada Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Anggaran Pembangunan
Jakarta, 24 Desember 1997**

Bapak Presiden yang kami hormati,

Bapak Wakil Presiden yang kami hormati,

Sidang yang mulia,

Setelah mengikuti penjelasan Menteri Keuangan mengenai keadaan perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia pada umumnya, serta proyeksi kebijaksanaan-kebijaksanaan sisi penerimaan dan pengeluaran rutin RAPBN 1998/99, perkenankanlah kami untuk melanjutkan dengan penjelasan bagian RAPBN 1998/99 yang berkenaan dengan anggaran pembangunan, serta pokok-pokok pikiran yang melandasinya.

Kita semua menyadari, dan tadi telah digambarkan pula oleh Menteri Keuangan, betapa besarnya tantangan yang kita hadapi dewasa ini di bidang ekonomi. Keadaan yang berat ini tercermin pula dalam anggaran belanja negara, terutama dalam anggaran pembangunan. Mengapa demikian, oleh karena kebutuhan rutin betapa pun besarnya harus dipenuhi dulu, dan baru sisanya dapat digunakan untuk pembangunan.

Tabel 1 memperlihatkan dalam format yang diperingkat apa yang tadi telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan secara lebih rinci RAPBN 1998/99 dibandingkan dengan APBN 1997/98. Yang kami mohonkan perhatian adalah pada sisi pengeluaran dari *T-Account* ini, khususnya pada pengeluaran pembangunan.

Anggaran pembangunan memang meningkat 5,6% yaitu menjadi Rp41,1 triliun, namun di balik peningkatan itu ada hal-hal yang patut diperhatikan.

Pertama, pembiayaan rupiah berkurang dengan 14,7%. Itu pun oleh karena ada bantuan program, yakni dana bantuan luar negeri yang dapat dirupiahkan dalam pembangunan. Tanpa itu, anggaran rupiah, yang hanya berasal dari tabungan pemerintah berkurang dengan hampir 41%. Terakhir kita menerima bantuan program di tahun 1992/93.

Kedua, untuk pertama kali sejak tahun 1991/92, tabungan pemerintah dalam anggaran pembangunan lebih kecil dari bantuan luar negeri. Tabungan pemerintah tahun 1998/99 sebesar Rp15,3 triliun itu dibandingkan dengan keseluruhan anggaran pembangunan hanyalah 37,2%nya. Perimbangan ini mencerminkan pula keadaan ekonomi kita dewasa ini yang masih akan terus berlanjut dampaknya ke tahun anggaran yang akan datang.

Ketiga, anggaran rupiah akan menjadi sangat ketat, dan karena ketersediaannya berkurang sangat berarti, yaitu 14,7% atau hampir 15%, meskipun sudah ditambah dana dari bantuan program, maka semua sektor akan mengalami penurunan (kecuali satu sektor, yaitu pembangunan daerah). Dengan sendirinya, karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai prioritas, maka penurunan tersebut tidak bisa dilakukan secara pukol rata. Ada yang turun lebih besar, dan ada yang turun lebih kecil.

Keempat, peningkatan anggaran pembangunan terjadi hanya karena adanya peningkatan dalam nilai rupiah dari bantuan proyek, yaitu sebesar hampir 46%. Peningkatan ini disebabkan semata-mata karena perubahan yang besar pada kurs US\$ terhadap Rupiah. Dalam nilai US\$ bantuan proyek tersebut justru menurun, yaitu dari US\$ 5.250,3 juta di tahun 1997/98 menjadi

US\$ 4.751 juta dalam tahun 1998/99. Penurunan ini disebabkan juga karena adanya depresiasi dari nilai mata uang asing lain terhadap US\$ dalam paket bantuan luar negeri kita.

Kelima, bantuan proyek menjadi lebih penting perannya bagi kegiatan pembangunan. Kita harus bisa memanfaatkan secara maksimal bantuan proyek untuk sejauh mungkin mengamankan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan pada tahun terakhir Repelita VI itu. Selama ini diketemukan bahwa ada kelambatan dalam penyerapan bantuan proyek karena berbagai sebab. Dalam keadaan ketersediaan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri serba terbatas, maka penyerapan bantuan luar negeri harus diupayakan secara maksimal.

Demikianlah gambaran umum mengenai anggaran pembangunan yang tersedia dalam RAPBN 1998/99.

Tahun 1998/99 adalah tahun terakhir Repelita VI. Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, seperti dapat dilihat dalam tabel 2, anggaran pembangunan dalam Repelita VI telah diusahakan sedekat mungkin dengan sasarannya dalam Repelita VI. Perbedaannya kecil sekali, yaitu sekitar 1% dari sasaran. Hanya pada tahun 1998/99 ini saja anggaran pembangunan berbeda cukup besar dari sasaran Repelita VI, yaitu 7,6% di bawahnya, dalam angka absolut hampir Rp3,4 triliun. Dari segi tabungan pemerintah, bahkan hanya sekitar separuh saja dari yang direncanakan dalam Repelita VI, yaitu Rp30,1 triliun. Sebenarnya apabila kita bandingkan APBN 1997/98 yang sesungguhnya yaitu setelah ada penjadwalan kembali anggaran pembangunan, keadaannya hampir serupa untuk tahun keempat Repelita VI.

Dengan kondisi yang demikian itu telah diupayakan untuk menyusun anggaran pembangunan tahun 1998/99. Bapak Presiden telah memberi petunjuk bahwa RAPBN 1998/99 harus bersifat realistis dan transparan. Meskipun ada pengetatan anggaran, upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan harus dilanjutkan dan diprioritaskan. Oleh karena itu, anggaran pembangunan yang didaerahkan yang menjadi wahana penanggulangan kemiskinan dan pemerataan, tetap mendapat prioritas.

Dalam tabel 3 diperlihatkan betapa anggaran rupiah yang didaerahkan meningkat dengan 1,2% (1), padahal anggaran rupiah yang dikelola oleh instansi di tingkat pusat menurun dengan 24,5% (3). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh karena meningkatnya dana PBB dengan 16,2% (2.b.1) dan adanya komponen anggaran baru yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (2.b.2). BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atas bangunan. Hasil penerimaan bea atas pajak ini dibagi untuk pemerintah pusat 20% dan pemerintah daerah 80%. Hasil penerimaan pemerintah daerah selanjutnya dibagi untuk Pemda Tk.I yang bersangkutan 20% dan untuk Pemda Tk. II yang bersangkutan 80%. Besarnya penerimaan BPHTB tahun 1998/99 untuk Dati I adalah Rp80,0 miliar dan Dati II Rp320,0 miliar. Suatu jumlah yang cukup besar. Secara keseluruhan dari dana PBB dan BPHTB yang akan diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp3 triliun, meningkat 33,8% dibanding tahun 1997/98 (2.b).

Anggaran di tingkat pusat itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu yang ditangani secara langsung oleh Departemen/LPND yang menjadi pembina atau pengelola sektor dan yang secara tidak langsung, yaitu melalui apa yang disebut Bagian XVI. Anggaran yang dikelola langsung oleh Departemen/LPND itu berjumlah Rp11.361,6 miliar, turun 23,8% dibanding APBN tahun 1997/98 (3.a). Anggaran yang dialokasikan pada Bagian XVI pada dasarnya sebagian besar adalah terdiri dari anggaran yang didaerahkan kurang lebih Rp10 triliun (2) dan sisanya sebesar Rp712,3 miliar dikelola di tingkat pusat (3.b).

Pada tabel ini diperlihatkan pula anggaran pembangunan 1997/98 setelah dijadwalkan kembali (kolom 5). Dana rupiah untuk pembangunan yang tersedia berkurang dengan Rp3,2 triliun atau berkurang 12,3%, menjadi Rp22.623,0 miliar. Dibanding dengan anggaran rupiah yang dijadwalkan kembali dalam tahun 1997/98 itu, RAPBN tahun 1998/99 sebesar Rp22.103,9 miliar tampak masih lebih kecil yaitu dengan 2,3% (baris 1 kolom 9). Sebaliknya anggaran yang didaerahkan tidak dikurangi, sehingga yang berkurang besar adalah anggaran yang dikelola di tingkat pusat. Anggaran yang dikelola oleh Departemen/LPND di pusat sebesar Rp11,4 triliun,

lebih rendah 23,8% dibanding APBN 1997/98 dan masih lebih rendah 5,8% dibanding APBN yang dijadwalkan (3.a).

Dengan demikian makin tampak betapa pemerintah konsisten dengan kebijaksanaan pemerataan dan tetap melanjutkan kebijaksanaan untuk menyebarkan kegiatan pembangunan secara efektif di daerah meskipun dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Anggaran rupiah yang didaerahkan mencapai dua per tiga dari seluruh tabungan pemerintah dan merupakan 45% lebih dari seluruh anggaran rupiah (baris 2 kolom 7).

Maka dari segi pemerataan kegiatan pembangunan, yaitu kegiatan pembangunan di daerah yang didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat dampak dari kondisi keuangan negara dewasa ini lebih kecil. Kita mengharapkan aparat pemerintah daerah baik di tingkat I maupun di tingkat II dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik, untuk memelihara momentum pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah.

Anggaran yang didaerahkan, selain yang langsung diserahkan berupa PBB dan BPHTB, bagian yang terbesarnya disalurkan melalui berbagai program Inpres. Memang dalam program Inpres pun ada penurunan anggaran, tetapi dibandingkan dengan penurunan secara keseluruhan masih jauh lebih kecil. Mengenai program-program Inpres akan kami jelaskan secara tersendiri satu per satu kemudian, karena memang sangat strategis sifatnya dalam konsep pembangunan kita. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4, memperlihatkan peran dari dana Inpres dan PBB dalam APBD Dati I. Dana Inpres dan PBB secara rata-rata meningkat perannya dalam APBD Dati I, dari 17,6% di tahun 1996/97 menjadi 19% di tahun 1997/98. Di wilayah KTI peran bantuan dana dari pusat ini menjadi lebih besar lagi, yaitu hampir 44% di tahun 1997/98, naik dari 42% di tahun 1996/97.

Selanjutnya perkenankan kami memberi penjelasan sedikit lebih jauh mengenai Inpres-inpres itu.

Untuk Inpres Desa, seperti dapat dilihat pada tabel 5 disediakan anggaran Rp476,9 miliar. Ada peningkatan 1,7%, semata-mata karena bertambahnya jumlah desa. Dalam Inpres Desa termasuk bantuan untuk pembinaan PKK, anak, dan remaja serta untuk pembinaan masyarakat tertinggal di semua desa di seluruh Indonesia.

Pada tabel 6 diperlihatkan Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Dana yang disediakan untuk IDT berkurang menjadi Rp204,6 miliar atau 57,4%. Ada dua sebab pengurangan tersebut. *Pertama* karena jumlah desa yang memperoleh bantuan langsung untuk modal kerja bagi masyarakat miskin telah berkurang. Sebagaimana dimaklumi sesungguhnya seluruh desa IDT yang asli yang berjumlah 24.414 itu telah memperoleh dana IDT tiga kali. Sejak dua tahun anggaran yang lalu seluruh desa di 4 propinsi yaitu NTT, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya, dan 4 kabupaten yang terpencil, yaitu Sangihe Talaud, Lubuk Banggai, Riau Kepulauan, dan Nias, memperoleh pula bantuan IDT, sehingga jumlah desa yang memperoleh bantuan menjadi 28.376. Desa yang belum memperoleh tiga kali (masing-masing sebesar Rp20 juta) adalah di wilayah 4 propinsi dan 4 kabupaten tersebut dan jumlahnya tinggal 3.750 desa. Dengan dana IDT satu kali lagi ini maka seluruh desa telah terpenuhi bantuannya. Program IDT ini telah mendapat perhatian yang sangat luas bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dari lembaga-lembaga di luar negeri. Mereka telah mengadakan berbagai studi dan kajian yang sebagian telah dipublikasikan yang menunjukkan keberhasilan program ini dan ketepatan dalam pendekatannya, meskipun diketemukan pula kekurangan-kekurangannya. Dengan selesainya pemberian bantuan modal tersebut kepada semua desa IDT, maka upaya selanjutnya adalah menjaga agar dana tersebut dapat terus bergulir dengan baik dan dengan demikian secara efektif dapat mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa yang kondisinya tertinggal itu.

Kedua, dalam upaya mempercepat pembangunan prasarana dan sarana perdesaan, yang keberadaannya atau kelangkaannya mengakibatkan desa-desa itu menjadi tertinggal, diusahakan untuk memperoleh bantuan luar negeri.

Selama ini telah diperoleh bantuan dari Bank Dunia dan OECF (Jepang) dalam program yang disebut Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal disingkat P3DT. Bantuan Bank Dunia dikonsentrasikan di pulau Jawa dan sebagian di pulau Sumatera sedangkan dari OECF di KTI dan di pulau Sumatera diluar yang ditangani oleh Bank Dunia. Mulai tahun anggaran yang akan datang ditambah program baru dari Bank Dunia, yaitu yang disebut program pengembangan kecamatan. Program ini merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung langsung kegiatan usaha produktif masyarakat di desa tertinggal dan di desa lain yang terkena dampak kekeringan dengan kegiatan padat karya dan dengan pendekatan koordinasi antardesa dalam satu wilayah kecamatan.

Melalui ketiga program tersebut dalam tahun anggaran 1998/99 akan ditangani pembangunan prasarana perdesaan di 6.905 desa. Prasarana tersebut meliputi jalan dan jembatan desa, saluran irigasi, air bersih dan berbagai prasarana yang mendukung kegiatan produktif masyarakat.

Dengan berbagai program tersebut, maka dana rupiah yang dalam tahun anggaran ini disediakan untuk membangun prasarana perdesaan tidak dilanjutkan dan seterusnya sepenuhnya akan menggunakan dana bantuan luar negeri. Yang ditampung dalam Inpres ini hanyalah rupiah pendampingnya saja, sedangkan bantuan luar negeri-nya menggunakan mekanisme tersendiri. Oleh karena itu, dana IDT sepertinya menurun. Padahal kegiatannya akan sangat meningkat, oleh karena untuk pembangunan prasarana perdesaan dalam tahun anggaran 1998/99 disediakan anggaran seluruhnya Rp1.011,5 miliar seperti dapat dilihat pada keterangan pada angka 5. Program ini mempunyai dua tujuan, *pertama* untuk mengatasi salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan yaitu kurangnya prasarana dasar ekonomi, dan *kedua* untuk mengatasi masalah pengangguran, antara lain sebagai dampak dari gejolak moneter dan kekeringan, dengan menyediakan lapangan kerja produktif di perdesaan. Prioritas akan diberikan kepada desa-desa yang menjadi sumber tenaga kerja musiman atau harian yang datang mencari kerja di kota besar khususnya Jakarta di luar musim tanam dan musim panen. Dengan demikian diharapkan dapat mengekang arus urbanisasi. Pada prinsipnya pembangunan prasarana perdesaan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri dengan bimbingan dari instansi teknis yang bersangkutan.

Selanjutnya, pada tabel 7, kami perhatikan Inpres Dati II. Inpres ini memperoleh anggaran sebesar Rp3.220,9 miliar, turun dengan 7,6% dibandingkan dengan tahun yang berjalan. Meskipun turun, masih tetap merupakan Inpres yang terbesar, yaitu merupakan 46,1% dari seluruh anggaran untuk Inpres, sesuai dengan rencana untuk menjadikan Dati II sebagai titik berat otonomi daerah.

Kriteria dasar Inpres Dati II tidak berubah, tetapi ada peningkatan pada jumlah penduduk.

Apabila di tahun-tahun yang lalu kami menjelaskan mengapa terjadi peningkatan-peningkatan, untuk tahun ini kami harus menjelaskan mengapa terjadi penurunan-penurunan dalam berbagai Inpres itu.

Dalam Inpres ini penurunan terjadi terutama karena dua hal, yaitu dihapuskannya program untuk pembangunan jalan poros desa dari Inpres Dati II, karena selanjutnya akan ditampung seluruhnya dalam program IDT seperti telah kami uraikan tadi (2.h). Selain itu, juga ada pengurangan pada dana yang disediakan untuk membantu pembangunan prasarana dasar permukiman (2.k). Penurunan disini disebabkan karena sebagian kegiatannya juga akan dialihkan ke program IDT dalam rangka pembangunan prasarana desa-desa tertinggal, yang termasuk juga di wilayah sekitar perkotaan. Penurunannya cukup besar yaitu dari Rp290 miliar menjadi Rp150 miliar atau 48,3%. Namun, dengan penajaman prioritas, peningkatan efisiensi dan mencegah pemborosan kiranya dana sebesar itu masih cukup memadai dan dapat berdampak besar pada pembangunan prasarana desa terutama di wilayah perkotaan. Kegiatan ini akan diupayakan dengan cara padat karya sehingga menciptakan lapangan kerja yang sebesar mungkin.

Selain pengurangan itu ada berbagai kegiatan baru. *Pertama*, bantuan program pengembangan wilayah, untuk dana pendamping bantuan luar negeri untuk beberapa Dati II yang

memperolehnya (2.o). *Kedua*, bantuan untuk penataran P-4 di Dati II, yaitu bantuan untuk BP-7 di Dati II yang acapkali mengeluh karena kurangnya dukungan dana (2.p). *Ketiga*, bantuan untuk pembudayaan disiplin nasional. Sifatnya merupakan bantuan untuk merangsang masyarakat untuk membudayakan dan memantapkan gerakan disiplin nasional di daerah (2.q). Pertimbangannya adalah justru dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang, kita harus memperkuat jati diri dan persatuan dan kesatuan bangsa serta makin memantapkan disiplin, agar bangsa kita dapat melewati masa yang penuh tantangan ini dengan baik, dengan sesedikit mungkin pengorbanan dan selanjutnya membuat bangsa kita tumbuh justru lebih kuat lagi di masa depan.

Komponen-komponen lainnya tidak banyak berubah, walaupun ada, relatif kecil-kecil saja.

Selanjutnya, mengenai Inpres Dati I dapat dilihat pada tabel 8. Dana untuk Inpres ini tersedia sebesar Rp1.616,6 miliar, juga turun yaitu dengan 2,7%.

Kriteria bantuan dasar tidak banyak berubah. Seperti juga dalam Inpres Dati II, ada komponen baru yaitu bantuan untuk membudayakan disiplin nasional di tingkat propinsi (2.o). Pencanangan gerakan disiplin nasional telah dilakukan oleh Bapak Presiden di tingkat nasional, langkah selanjutnya adalah memasyarakatkannya yang harus dilakukan mulai dari masyarakat di di tingkat atas sampai di tingkat yang paling bawah.

Komponen-komponen lain tetap, penurunan yang terjadi memang disebabkan oleh karena pengetatan anggaran rupiah, sehingga berbagai sasaran ditetapkan lebih kecil dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dalam hal dana reboisasi, pengurangannya juga oleh karena musim kering yang panjang menyebabkan tertundanya waktu penanaman.

Inpres selanjutnya adalah Inpres Sekolah Dasar, yaitu pada tabel 9. Dana untuk Inpres ini disediakan Rp594,9 miliar, turun 10,3%. Meskipun secara keseluruhan anggaran untuk Inpres ini turun, namun bantuan untuk biaya operasi dan pemeliharaan, yang diberikan kepada setiap sekolah (2.b), yang tahun lalu baru saja naik dari Rp700 ribu menjadi Rp800 ribu, akan dinaikkan lagi menjadi Rp850 ribu, antara lain untuk melengkapi dan memperbaharui kebutuhan peralatan sekolah. Karena jumlah SD/MI besar, maka bantuan ini meskipun per unitnya kelihatannya kecil tetapi secara keseluruhan cukup besar jumlahnya. Juga nilai itu sangat berarti terutama bagi daerah-daerah tertinggal dan terpencil di mana kemampuan orang tua murid untuk membantu pengelolaan sekolah sangatlah terbatas. Yang sangat kita harapkan adalah agar dana tersebut dapat diterima secara utuh oleh setiap sekolah tanpa potongan untuk tujuan apapun.

Juga ada peningkatan untuk program penataran dan penyeteraan guru D-2 untuk guru-guru agama dan guru kelas (5.c) serta untuk pengisian kebutuhan guru SD di daerah terpencil (5.d).

Penurunan yang terjadi dalam Inpres SD ini bukan karena semata-mata anggarannya dikurangi, karena Inpres ini tetap diprioritaskan karena mendasar sekali sifatnya dalam pembangunan SDM di tingkat yang paling awal dan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi dikarenakan telah selesainya berbagai program atau berkurangnya berbagai sasaran. Misalnya pembangunan SD baru dan rumah dinas sekolah (1.a dan 1.c). Juga buku pelajaran telah seluruhnya selesai dipenuhi (4.a). Seperti telah kami laporkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang lalu, buku-buku pelajaran tersebut diturunkan dari murid yang lama ke murid yang baru di kelas yang bersangkutan. Namun, setelah digunakan 3 tahun umumnya sudah perlu diganti atau diperbaharui. Dan itu yang akan dilakukan mulai tahun anggaran 1998/99 ini. Selain itu ada pula kegiatan yang pendanaannya dialihkan ke bantuan luar negeri, yaitu *sector program loan* (SPL) dari Jepang, yakni untuk pengadaan sarana transportasi penilik sekolah (5.b).

Pendataan sarana dan prasarana SD/MI di seluruh Indonesia oleh BPS telah selesai dilakukan dan kita sedang menunggu hasilnya, untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun program pembangunan SD/MI dalam Repelita VII.

Inpres selanjutnya adalah Inpres Kesehatan (Tabel 10). Dana untuk Inpres ini tersedia Rp570,9 miliar, turun 6,1%.

Meskipun secara keseluruhan dana untuk Inpres ini menurun, namun bantuan obat untuk menunjang kesehatan masyarakat meningkat dengan cukup besar dari Rp280,9 miliar menjadi Rp302,3 miliar atau naik 7,6%, terutama bantuan untuk pengadaan vaksin yang meningkat 23,8%. Bantuan obat mencakup obat TB-Paru, malaria, Vitamin A, tablet besi, diare, dan infeksi saluran pernapasan, sedangkan bantuan vaksin terdiri dari BCG (pencegah TBC), DPT (diphtheria pertusis tetanus), DT (diphtheria tetanus), Polio, Campak, TT (tetanus toxoid) dan Hepatitis B.

Penurunan disebabkan kebutuhan pembangunan fisik baru telah sangat jauh berkurang, karena program-programnya telah diselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam pembangunan Puskesmas baru dan peralatannya menurun cukup besar, yaitu 61,8% (2). Juga seperti pada Inpres SD oleh karena sebagian akan dialihkan untuk dibiayai dengan bantuan luar negeri (SPL) seperti pengadaan sepeda motor (2.e), peralatan Puskesmas (2.f) dan peralatan-peralatan nonmedis (4.f).

Meskipun ada pengurangan dalam berbagai pembangunan fisik, namun ada perluasan puskesmas pembantu sebagai kegiatan baru (3.b) dan juga akan dibangun ruang gawat darurat bagi 10 puskesmas yang terletak di jalur rawan kecelakaan di lintas Sumatera (3.d). Juga terus meningkat biaya untuk SDM kesehatan baik tenaga dokter, perawat maupun bidan desa (4). Pembangunan SDM kesehatan ini sangat penting sebagai tulang punggung seluruh program pembangunan kesehatan. Program penyehatan lingkungan dan air bersih (II), berkurang oleh karena sebagian kegiatannya akan ditampung dalam program pembangunan prasarana perdesaan dalam rangka IDT yang telah kami uraikan diatas.

Inpres yang terakhir adalah program makanan tambahan untuk anak sekolah atau Inpres PMT-AS. Inpres terbaru ini dapat dilihat pada tabel 11.

Program makanan tambahan untuk anak sekolah ini telah dimulai sejak tahun 1995/96 dalam skala kecil sebagai pilot project, dan dilanjutkan tahun 1996/97 sebagai salah satu kegiatan dari Inpres Kesehatan.

Dari pemantauan yang dilakukan, program makanan tambahan anak sekolah ini sangat berhasil, bukan saja terhadap anak sekolah yang bersangkutan dalam meningkatkan gairah belajar, tetapi juga telah meningkatkan kehidupan perekonomian di desa tertinggal tempat program tersebut dilaksanakan karena membantu memasarkan produksi pangan setempat, yang meningkat antara lain berkat keberhasilan program IDT. Atas dasar itu, maka program ini telah ditingkatkan cakupannya dan karena itu pula koordinasinya melalui Inpres tersendiri.

Di samping makanan tambahan tiga kali seminggu juga diberikan obat caceng untuk semua murid, dua kali setahun. Seperti yang telah berlaku selama ini, program ini merupakan kegiatan bersama antara Ibu-ibu PKK, orang tua murid, sekolah, dengan bimbingan dan pengawasan aparat desa. Juga ditegaskan bahwa bahan pangannya haruslah produk pertanian yang berasal dari desa setempat atau kawasan sekitarnya. Untuk tahun anggaran 1998/99 yang akan datang dana untuk Inpres PMT-AS meningkat 11,8%, oleh karena meningkatnya jumlah sekolah dan jumlah murid yaitu setelah dilakukan pendataan kembali, menjadi 8,8 juta murid di 49,5 ribu SD/MI.

Demikianlah rencana anggaran pembangunan yang penggunaannya dipercayakan kepada daerah pada berbagai tingkatan otonomi dan dengan berbagai jalur sektor melalui mekanisme Inpres.

Selanjutnya perkenankan kami meneruskan dengan penjelasan anggaran menurut sektor, yang pelaksanaannya dilakukan baik oleh instansi pusat maupun oleh daerah, termasuk di dalamnya dana-dana Inpres yang pokok-pokoknya telah kami laporkan tadi. Untuk itu mohon dilihat tabel 12.

Seperti telah kami sampaikan tadi ketersediaan anggaran rupiah sangat menurun, oleh karena itu, semua sektor (kecuali pembangunan daerah) terpaksa harus mengalami penurunan dalam anggaran rupiahnya. Memang masalah yang paling utama dalam penyusunan anggaran pembangunan adalah pengalokasian dana rupiah, oleh karena di situlah paling banyak terletak

kebutuhannya. Namun, selain anggaran rupiah, ada dana bantuan luar negeri yang juga merupakan komponen penting dalam anggaran pembangunan yang seperti kami kemukakan diatas harus sungguh-sungguh dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan untuk tidak hanya melihat anggaran rupiah saja dalam menilai dan mengkaji anggaran pembangunan tahun 1998/99 ini --- meskipun sebagai indikator tetap penting --- tetapi keseluruhan anggaran pembangunan yang tersedia, baik itu berupa anggaran rupiah maupun bantuan luar negeri.

Dalam tabel 12 ini, kami juga memperlihatkan selain APBN 1997/98 seperti yang direncanakan juga setelah dijadwalkan kembali. Kalau kita akan membandingkan anggaran tahun ini dengan tahun yang akan datang, menurut hemat kami yang paling realistis haruslah dengan APBN yang telah dijadwalkan kembali itu, karena itulah APBN yang sesungguhnya berlaku dan sekarang sedang kita laksanakan. Dengan penglihatan demikian, maka semua sektor mengalami peningkatan anggaran pembangunan. Pengurangan yang terjadi dalam anggaran rupiah juga lebih kecil apabila kita bandingkan dengan APBN aslinya, yang sudah tidak kita anut lagi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya perkenankan kami melaporkan pembangunan sektor-sektor menurut urutannya pada tabel 12.

Sektor yang pertama adalah sektor industri. Sektor industri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp595,0 miliar, dengan kenaikan 19,1% dibandingkan dengan anggaran 1997/98 setelah dijadwalkan kembali yang selanjutnya dalam uraian mengenai rencana pembangunan diberbagai sektor di tahun 1998/99 ini akan digunakan sebagai pembanding. Anggaran yang dialokasikan pada sektor ini adalah untuk menggerakkan dan mendukung perkembangan usaha industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi disertai dan dengan melalui pemerataan pembangunan, memantapkan program penghapusan kemiskinan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Prioritas yang diberikan untuk sektor ini adalah meningkatkan kemampuan teknologi industri untuk mendukung daya saing industri nasional dalam berbagai jenis industri, termasuk industri strategis serta industri enjinering dan pembinaan industri kecil untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil melalui lembaga yang mandiri dan mengakar pada masyarakat antara lain lembaga seperti pondok-pondok pesantren.

Sektor yang kedua adalah sektor pertanian dan kehutanan. Sektor ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp1.571,8 miliar atau meningkat 18,1%. Prioritas pembangunan diberikan kepada peningkatan mutu intensifikasi pengembangan sistem agrobisnis berbagai komoditas unggulan, perluasan usaha pertanian pada berbagai agroekosistem dan penumbuhan kelompok tani yang terintegrasi dalam wadah koperasi/KUD serta pengembangan kemitraan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat perdesaan. Pembangunan kehutanan terutama ditujukan untuk pemantapan fungsi ekologis serta peningkatan fungsi ekonomis dan sosial hutan. Selain itu, ditingkatkan pula pembangunan sistem komunikasi kehutanan dalam rangka pengamanan hutan dari bahaya kebakaran dan perusakan.

Sektor yang ketiga adalah sektor pengairan yang memperoleh anggaran sebesar Rp2.835,0 miliar untuk pengembangan sumberdaya air dan pembangunan irigasi. Anggaran tahun 1998/99 ini meningkat 24,1% dan sektor ini menempati urutan kelima terbesar dalam alokasi anggaran pembangunan. Memang sektor ini diprioritaskan pula, oleh karena mendukung kegiatan dan produksi pertanian. Pengembangan sumberdaya air terutama diprioritaskan untuk pengaturan alokasi dan konservasi sumberdaya air serta rehabilitasi dan pembangunan waduk-waduk dan embung-embung. Pengembangan sumberdaya air juga ditujukan untuk pembangunan prasarana air baku bagi permukiman, industri, serta pariwisata. Pembangunan irigasi diarahkan untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan dalam rangka menjaga fungsi jaringan, disamping meningkatkan efisiensi. Pembangunan jaringan irigasi baru terus dilanjutkan dalam rangka mempertahankan swasembada beras dan diversifikasi pola tanam, antara lain melalui pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dalam tahun 1998/99 akan dibangun jaringan sekunder yang akan melayani areal seluas 145.000 hektar, serta jaringan tersier dan kuarter yang akan melayani areal persawahan seluas 35.000 hektar.

Sektor yang keempat adalah sektor tenaga kerja. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp281,0 miliar, meningkat sebesar 21,3%. Dari anggaran pembangunan di sektor ini, 42,0% penggunaannya akan diarahkan ke KTI. Kegiatan pokoknya adalah pelatihan institusional pada Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan bagi pencari kerja usia muda dan pekerja yang akan meningkatkan keterampilannya. Diupayakan pula meningkatnya produktivitas tenaga kerja pada usaha kecil, menengah, koperasi, dan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat, melalui pelatihan manajemen. Juga akan diprioritaskan kegiatan yang bersifat padat karya melalui pembangunan rehabilitasi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha produktif dalam rangka mengatasi masalah pengangguran terutama di daerah yang terkena dampak kekeringan dan bencana alam lainnya.

Sektor kelima adalah sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi yang memperoleh anggaran sebesar Rp693,0 miliar, naik 34,5% yakni salah satu angka kenaikan yang tertinggi. Kegiatan di sektor ini akan melanjutkan pengembangan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pelayanan informasi perdagangan, mendorong pengembangan perekonomian di perdesaan melalui pembangunan pasar desa dan peningkatan kelembagaan serta peningkatan daya saing komoditas ekspor. Kegiatan pembangunan koperasi mengutamakan peningkatan ketangguhan dan kemandirian koperasi melalui peningkatan profesionalisme, jaringan usaha, dan pemantapan kelembagaan koperasi, serta pengembangan koperasi simpan pinjam.

Sektor keenam adalah sektor transportasi, meteorologi dan geofisika. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp7.063,8 miliar atau meningkat sebesar 13,9%. Sektor transportasi ini, memperoleh anggaran terbesar kedua setelah sektor pembangunan daerah. Sebagian besar anggaran di sektor ini yaitu sebesar 61,8% dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan. Pembangunan prasarana jalan diarahkan terutama untuk membuka daerah-daerah terisolir termasuk daerah-daerah perbatasan dan transmigrasi, di samping menunjang pembangunan daerah yang mengalami pertumbuhan pesat. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan direncanakan 47% dialokasikan di KTI. Sedangkan pembangunan jalan arteri/kolektor direncanakan 41,1% untuk KTI.

Pembangunan transportasi darat akan meningkatkan fasilitas lalu lintas untuk mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan transportasi jalan raya. Dalam tahun 1998/99 akan dibangun jalan kereta api baru sepanjang sekitar 30 km diantaranya lanjutan pembangunan jalan kereta api pada lintas Citayam-Cibinong, Duri-Tangerang, jalur ganda Cikampek-Cirebon, dan persiapan pembangunan jalan kereta api baru di Aceh yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat Aceh, dan pembangunan jalur ganda lintas Kroya-Yogyakarta.

Pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilanjutkan untuk membuka, meningkatkan, serta menunjang perekonomian di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil. Dalam tahun anggaran 1998/99 antara lain akan dilanjutkan pembangunan 8 kapal perintis, 6 diantaranya untuk wilayah KTI.

Pembangunan transportasi laut akan meliputi pembangunan dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpang dan gudang serta fasilitas keselamatan pelayaran yang berupa menara suar, rambu suar, dan pengerukan alur pelayaran. Selain itu dilanjutkan pembangunan pelabuhan Semarang dan Ujung Pandang.

Dalam pembangunan transportasi udara akan dikembangkan bandara pada 7 lokasi, 3 lokasi diantaranya di KTI. Selain itu, akan dilaksanakan pemasangan peralatan telekomunikasi untuk keselamatan penerbangan pada 18 lokasi yang seluruhnya berada di KTI.

Sektor ketujuh adalah sektor pertambangan dan energi. Sektor ini memperoleh anggaran terbesar keempat yaitu sebesar Rp4.715,7 miliar, meningkat 12,3%. Anggaran dalam sektor ini lebih dari 98,7% -nya adalah untuk sub sektor energi. Sub sektor energi ini akan melanjutkan pembangunan sejumlah pembangkit tenaga listrik terutama untuk diluar Jawa, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi serta kelengkapannya. Kecuali itu, dilanjutkan pula pembangunan listrik

pedesaan yang akan melistriki 2.530 desa yang 22% diantaranya berada di KTI. Dengan demikian jumlah desa yang terlistriki akan mencapai 97% dari sasaran Repelita VI.

Sektor kedelapan yaitu sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi memperoleh anggaran sebesar Rp982,7 miliar. Anggaran ini lebih dari 92,3%-nya adalah untuk sub sektor pos dan telekomunikasi. Pembangunan sub sektor pariwisata yang anggarannya meningkat 38,5%, akan melanjutkan kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pembangunan sektor ini diupayakan pula untuk mengembangkan SDM pariwisata serta berbagai obyek dan daya tarik wisata serta fasilitas kepariwisataan di berbagai tempat tujuan wisata. Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan pada pengembangan jasa pos dan giro serta pembangunan transmisi telekomunikasi yang menghubungkan KBI dan KTI, guna meningkatkan kesiapan kita dalam memasuki era teknologi informasi.

Sektor kesembilan adalah sektor pembangunan daerah dan transmigrasi. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp7.857,3 miliar yang merupakan anggaran yang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Sebagian besar dari kegiatan di sektor ini telah kami laporkan pada waktu melaporkan program-program Inpres.

Dalam sektor ini termasuk sub sektor transmigrasi yang memperoleh anggaran sebesar Rp1.071,0 miliar. Anggaran di sub sektor ini memang menurun oleh karena disini hampir tidak ada bantuan luar negeri yang di dalam sektor-sektor lain telah membantu meningkatkan anggaran pembangunan, sehingga sub sektor transmigrasi hanya mengandalkan anggaran rupiah yang sangat terbatas itu. Namun dengan penajaman prioritas, anggaran yang berkurang tersebut akan dirancang untuk memberikan hasil yang optimal. Dengan anggaran yang 69,0%-nya dialokasikan di KTI itu akan dilakukan pembukaan 150 unit permukiman transmigrasi yang tersebar di 21 propinsi yang terdiri dari 40 UPT di KBI dan 110 UPT di KTI. Jumlah daya tampung permukiman tersebut adalah sekitar 42,5 ribu kepala keluarga transmigran, diantaranya 12,5 ribu kepala keluarga akan ditempatkan dilokasi pengembangan pertanian lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Sektor kesepuluh adalah sektor lingkungan hidup dan tata ruang yang memperoleh anggaran sebesar Rp694,4 miliar atau meningkat sebesar 8,8%. Pembangunan sektor lingkungan hidup ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian mutu dan fungsi lingkungan hidup, melanjutkan pengendalian terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan serta mengembangkan sistem jaringan pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang dengan pembinaan masyarakat desa pantai. Selanjutnya akan ditingkatkan kemampuan pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan Bapedal Wilayah di 3 (tiga) lokasi yaitu Riau, Ujung Pandang, dan Denpasar.

Sektor kesebelas adalah sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan olahraga. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp4.942,3 miliar, yang merupakan urutan nomor tiga terbesar dan meningkat 16,4%. Sebagian kegiatan di sektor ini telah kami laporkan pada waktu membahas berbagai Inpres antara lain Inpres SD. Di luar itu anggaran pendidikan diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Perhatian yang besar diberikan pula pada peningkatan kualitas tenaga pengajar di semua jenjang pendidikan.

Sektor duabelas adalah sektor kependudukan dan keluarga sejahtera yang memperoleh anggaran sebesar Rp525,2 miliar, meningkat 30,9%, salah satu peningkatan yang tertinggi pula diantara sektor-sektor. Anggaran ini dipergunakan untuk pelayanan reproduksi keluarga sejahtera, pengembangan ekonomi keluarga sejahtera dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera, peningkatan kedewasaan usia perkawinan dan penurunan angka kelahiran. Kegiatan di sektor ini yang penting pula adalah memberikan dukungan untuk kelancaran program Takesra dan Kukesra sebagai upaya yang penting, bersama program IDT, dalam menanggulangi kemiskinan.

Sektor ketigabelas adalah sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp2.164,1 miliar meningkat 6,8%. Peningkatan tersebut tidak terlalu besar, oleh karena peningkatan bantuan luar juga kecil saja.

Namun dari segi anggaran rupiah, sektor ini menempati urutan keempat terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan berbagai kegiatan sosial tersebut tetap mendapat prioritas yang cukup tinggi dalam pengalokasian anggaran.

Anggaran untuk sub sektor kesejahteraan sosial sebesar Rp305,2 miliar, terutama digunakan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kegiatannya meliputi pembinaan masyarakat terasing, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial dan pembinaan panti-panti sosial. Dalam sub sektor ini termasuk pula upaya mengatasi dampak dari berbagai bencana alam.

Sub sektor kesehatan memperoleh anggaran Rp1.532,9 miliar. Sebagian dari kegiatan sub sektor kesehatan ini telah kami sampaikan pada waktu melaporkan Inpres Kesehatan. Pembangunan kesehatan, selain membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar melalui program Inpres juga melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, antara lain RS Liwa di Propinsi Lampung, RS Lhokseumawe dan RS Tapaktuan di Propinsi Aceh, RS Dumai di Propinsi Riau, RS Sekayu di Propinsi Sumatera Selatan, RS Liun Kendage di Propinsi Sulawesi Utara, serta peningkatan kemampuan RS kabupaten sehingga setara dengan rumah sakit kelas C.

Sektor keempat belas adalah sektor perumahan dan permukiman yang memperoleh anggaran sebesar Rp1.616,6 miliar. Anggaran sektor ini memperoleh kenaikan sebesar 10,7%. Kegiatan di sektor ini terutama adalah untuk mendukung pembangunan permukiman rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS).

Sektor kelimabelas adalah sektor agama yang memperoleh anggaran sebesar Rp326,4 miliar dengan peningkatan cukup besar yaitu 24,5%. Sebagian besar dari anggaran ini yaitu 91,0% dialokasikan untuk sub sektor pendidikan agama. Kegiatan di sektor ini adalah mendukung penyediaan sarana dan prasarana keagamaan, meningkatkan mutu pendidikan agama di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta melanjutkan peningkatan mutu pendidikan dasar dan perluasan kesempatan belajar di Madrasah Tsanwiyah dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Sektor keenambelas adalah sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp1.068,4 miliar, dan peningkatannya adalah sebesar 41,2%. Anggaran pembangunan itu akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknik produksi, penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan terapan dan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana IPTEK, meningkatkan pembangunan di bidang kelautan dan kedirgantaraan serta mengembangkan sistem informasi dan statistik.

Sektor berikutnya adalah sektor hukum yang memperoleh anggaran sebesar Rp176,2 miliar, yaitu meningkat 11,8%. Kegiatan yang akan didukung dengan anggaran ini antara lain adalah melanjutkan crash program penyelesaian perkara tunggakan pada tingkat kasasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian, menyelenggarakan penyuluhan hukum, mewujudkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, dan membangun prasarana dan sarana hukum untuk memenuhi kebutuhan secara bertahap.

Sektor yang kedelapan belas adalah sektor aparaturnegara dan pengawasan. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp813,9 miliar, meningkatnya kecil saja, yaitu 4,2% oleh karena tidak banyak bantuan luar negeri di sektor ini. Anggaran di sektor ini mendukung upaya pendayagunaan aparaturnegara serta meningkatkan kemampuan SDM-nya. Juga mencakup penyempurnaan sistem dan peningkatan pelaksanaan pengawasan pembangunan melalui antara lain pemutakhiran dan penyusunan pedoman pengawasan, pembinaan dan pemasyarakatan pegawai, serta pemantapan pelaksanaan operasional pengawasan.

Sektor yang kesembilan belas adalah sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi, dan media masa. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp321,7 miliar yang meningkat 24,4%. Anggaran di sektor ini antara lain digunakan untuk penataran P-4 di Pusat maupun bantuan untuk penataran P4 di daerah tingkat I dan tingkat II, serta membantu beberapa negara-negara berkembang yang memerlukan peningkatan keterampilan di Indonesia. Di bidang

penerangan, anggaran disediakan untuk mendukung kegiatan operasional penerangan di seluruh daerah berikut sarana dan prasarana penunjangnya serta pembangunan pemancar radio dan televisi dalam rangka meningkatkan luas daya jangkauannya dan kualitas siarannya. Di samping itu juga dipergunakan untuk mendukung kegiatan Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) sebagai upaya pemerataan informasi pembangunan ke daerah perdesaan, serta peningkatan mutu pers daerah.

Sektor yang terakhir adalah sektor pertahanan dan keamanan. Sektor ini memperoleh anggaran sebesar Rp1.862,8 miliar yakni meningkat sebesar 14,0%. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pemantapan sistem pembinaan, peningkatan kualitas personil, pemantapan sistem komando serta pemantapan sistem pengerahan potensi kekuatan kewilayahan, dan pembinaan potensi masyarakat untuk keperluan Hankamneg.

Di dalam pembangunan pertahanan dan keamanan ini diperlukan pengadaan peralatan canggih yang banyak diantaranya harus diimpor. Untuk itu sektor ini memerlukan cukup banyak bantuan luar negeri. Sedangkan anggaran rupiah murni dipergunakan antara lain untuk melanjutkan rehabilitasi rumah kumuh dan tidak layak huni di pangkalan-pangkalan ABRI dan sebagai dana pendamping peralatan impor. Pembangunan ABRI juga memanfaatkan peralatan yang telah di produksi di dalam negeri, antara lain oleh industri strategis.

Demikianlah, telah kami laporkan rencana pembangunan di beberapa sektor dan sub sektor secara sangat ringkas. Buku yang kami sampaikan memuat rencana pembangunan yang sedikit lebih rinci di berbagai sektor dan sub sektor yang kiranya tidak perlu kami bacakan disini.

Dalam upaya menjabarkan lebih lanjut rancangan pembangunan tersebut kedalam proyek-proyek dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan lebih rinci di masing-masing sektor dan sub sektor, kami ingin memohonkan perhatian rekan-rekan Menteri atas beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, dalam dua tahun terakhir Repelita VI, yaitu tahun anggaran 1997/98 dan tahun anggaran 1998/99 telah terjadi pengetatan anggaran, sehingga sasaran anggaran yang tercantum dalam Repelita VI pada 2 tahun tersebut tidak tercapai. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa sasaran dalam Repelita VI mungkin tidak tercapai. Namun kiranya perlu diusahakan untuk memanfaatkan secara optimal anggaran yang tersedia sehingga secara maksimal dapat mencapai atau mendekati sasaran Repelita VI dalam masing-masing sektor dan sub sektor.

Kedua, untuk tahun terakhir Repelita VI perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran masih dilakukan oleh Kabinet Pembangunan VI namun pelaksanaannya akan dilakukan oleh Kabinet yang akan datang. Dalam tahun terakhir Repelita VI, juga akan disusun Repelita VII. Kiranya dalam penyusunan rincian anggaran dan program-program pembangunan tahun 1998/99 perlu diupayakan agar kedua tugas Kabinet yang akan datang itu dapat dibantu persiapannya dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, dengan keterbatasan anggaran, prioritas pertamanya diberikan pada upaya untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung sampai selesai dan tidak terbengkalai. Diatas itu, jika masih ada kemampuan anggaran, dapat dilanjutkan dengan upaya untuk meningkatkan dan membangun proyek atau kegiatan baru. Dalam hal ini perlu diutamakan proyek-proyek yang dalam tahun anggaran 1997/98 telah ditunda karena terkena penjadwalan kembali.

Keempat, mengingat pentingnya peranan dana bantuan luar negeri khususnya untuk tahun anggaran yang akan datang, maka penyediaan dana rupiah pendampingnya perlu diprioritaskan.

Kelima, untuk menjamin keterpaduan dalam semua kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun yang diharapkan akan dilaksanakan oleh masyarakat (dunia usaha) maka perlu menjadi pedoman sasaran Repelita tahunan atau Sarlita yang telah disepakati bersama. Di dalam penyusunan anggaran pembangunan 1998/99, kiranya sudah tidak ada lagi proyek yang tidak mengacu kepada SARLITA.

Dan terakhir, dalam upaya menjamin sinkronisasi antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, proyek-proyek pembangunan telah direncanakan secara berjenjang

dengan menggabungkan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang mencapai puncaknya pada forum konsultasi nasional pembangunan (Konasbang). Dengan proses itu maka para Gubernur telah mengetahui prioritas proyek-proyek sektoral, terutama yang direncanakan akan berlokasi di daerahnya dan siap untuk mendukung dan mengamankannya. Kami harapkan tidak ada proyek pembangunan di luar yang telah disepakati dan dibahas dengan para Gubernur tersebut untuk menjamin keserasian serta keterpaduan pada pelaksanaannya nanti di daerah.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Bapak Wakil Presiden yang kami hormati,

Sidang yang mulia,

Demikianlah pokok-pokok anggaran pembangunan sebagai bagian dari RAPBN 1998/99. Selanjutnya kami mohonkan petunjuk Bapak Presiden.